



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS DAN *QUICK WINS*
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang signifikan dan strategis untuk pencapaian Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 maupun pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019;
- b. bahwa untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*, perlu ditetapkan Program Prioritas dan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Program Prioritas dan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS DAN *QUICK WINS* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2019.

KESATU : Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2019 merupakan program yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat isu, lintas urusan/sektor, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.
2. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis dalam Renstra 2015-2019 dan sasaran nasional dalam RKP 2019.
3. Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan berdasarkan arahan dan/atau Presiden.
4. Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat.
5. Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan.

6. Memerlukan tindak lanjut berupa kebijakan publik yang dikeluarkan dan koordinasi lintas sektoral.
7. Program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat isu, lintas urusan/sektor, berskala besar.
8. Suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
9. Dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

KEDUA : Program Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2019 memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Berasal dari program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2019.
2. Merupakan urusan utama (*core business*) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
3. Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan internal dan eksternal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
5. Dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksanaan Program Prioritas dan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2019 dilaporkan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
 PRIORITAS DAN *QUICK WINS*
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
 KEMARITIMAN TAHUN 2019

PROGRAM PRIORITAS
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
 TAHUN 2019

No	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2019	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2015-2019)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2019		
							PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan	1. Penajaman Rencana Aksi KKI tahun 2019 bersama dengan k/1 yang menjadi penanggung jawab untuk selanjutnya	1. Laporan kepada Presiden. 2. Menynergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita	1. Tercapainya visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 2. Dokumen Nasional Kebijakan	Seluruh masyarakat Indonesia.	SS1. Terwujudnya Indonesia Poros Maritim Dunia melalui pemerataan pembangunan dan	1. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas	1. Peningkatan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Percepatan peningkatan	1. Pengembangan pelabuhan dan angkutan tol laut. 2. Peningkatan dan penyediaan fasilitas

No	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2019	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2015-2019)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2019		
							PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kelautan Indonesia (KKI) dan rencana aksi KKI	<p>diinput di dalam <i>website</i> Sistem Pemantauan KSP.</p> <p>2. Pelaporan implementasi Rencana Aksi KKI tahun 2019 oleh K/L Penanggung Jawab secara Periodik (B04, B06, B09, dan B12).</p> <p>3. Verifikasi rencana aksi KKI tahun 2019 yang telah dilaporkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.</p> <p>4. Evaluasi hasil pelaporan dan verifikasi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Tahun 2019.</p>	Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.	Kelautan Indonesia akan menjadi pedoman bagi k/l dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha.		peningkatan daya saing bangsa	<p>dan kemaritiman.</p> <p>2. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya.</p> <p>3. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.</p>	<p>ekspor dan nilai tambah industri pengolahan.</p> <p>3. Peningkatan nilai tambah pariwisata dan jasa produktif lainnya.</p> <p>4. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi.</p>	<p>keselamatan dan keamanan transportasi.</p> <p>3. Pembangunan dan pengembangan transportasi multimoda dan perkotaan.</p> <p>4. Peningkatan dan penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi.</p>

No	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2019	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2015-2019)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2019		
							PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. Penyusunan Laporan Implementasi RAN KKI 2019 kepada Presiden.							
2.	Delimitasi Zona Maritim Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi penamaan rupa bumi. 2. Percepatan perundingan penetapan batas maritim. 3. Percepatan submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen submisi verifikasi pulau dan nama rupa bumi ke <i>United Nations Group of Experts on Geographical Names</i> (UNGEGN). 2. Dokumen perundingan penetapan batas maritim. 3. Dokumen submisi dan <i>desktop</i> analisis submisi penetapan landas kontinen Indonesia di luar 200 mil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian jumlah dan nama rupa bumi Indonesia. 2. Pencegahan konflik batas antar provinsi/ kabupaten/ kota terkait <i>entitlement</i> atas pulau dan fitur rupa bumi. 3. Kepastian penegakan hukum atas pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dalam 	Kementerian dan lembaga	Terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat regional dan global.	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahanan wilayah nasional. 2. Efektivitas diplomasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara. 2. Penguatan diplomasi maritim, politik, dan keamanan.

No	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2019	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2015-2019)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2019		
							PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>wilayah yurisdiksi.</p> <p>4. Perluasan wilayah yurisdiksi nasional landas kontinen di luar 200 mil.</p> <p>5. Hak berdaulat pengelolaan Sumber Daya Hayati dan Mineral di wilayah yurisdiksi Indonesia.</p>					
3.	Kebijakan pengembangan destinasi strategis pariwisata	<p>1. Rapat koordinasi penyelesaian Rperpres BOP Wakatobi dan Rperpres Bromo-Tengger-Semeru.</p> <p>2. Rapat koordinasi rencana penenggelaman kapal-kapal perang</p>	<p>1. Peraturan Presiden Badan Otorita Pariwisata (BOP) Wakatobi.</p> <p>2. Peraturan Presiden BOP Bromo-Tengger-Semeru.</p> <p>3. Buku Si Juki Jalan-Jalan Nusantara Edisi</p>	<p>1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata.</p> <p>2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Membantu menjaga</p>	<p>1. Kementerian Pariwisata.</p> <p>2. Masyarakat sekitar BOP Wakatobi dan Bromo, Tengger Semeru.</p>	Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan jasa maritim secara berkelanjutan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.	Peningkatan nilai tambah pariwisata dan jasa produktif.	Percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas termasuk 4 Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata dan penguatan pemasaran

No	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2019	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2015-2019)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2019		
							PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EX TNI AL menjadi destinasi wisata selam. 3. Bekerjasama dengan Tim Elex Media Komputindo dalam pembuatan buku "Si Juki Jalan-Jalan ke 10 Destinasi Pariwisata Prioritas" dengan tujuan Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika dan Wakatobi. Pelaksanaan Fokus Grup Diskusi (FGD) Penyiapan Badan Otorita Pariwisata.	Bromo-Tengger-Semeru dan Edisi Wakatobi. 4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Satuan Tugas Pemanfaatan Ex KRI TNI Angkatan Laut Menjadi Destinasi Wisata Selam dan Museum.	kelestarian lingkungan. 4. Memajukan kebudayaan.					pariwisata prioritas.
4.	Pengendalian pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi	1. Pengendalian pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi.	1. Inisiasi Hub baru. 2. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan	1. Turunnya disparitas harga antara wilayah Indonesia Timur	1. Rakyat di wilayah timur Indonesia. 2. Masyarakat.	SS1. Terwujudnya Indonesia Poros Maritim Dunia melalui pemerataan	Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan	Peningkatan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi.	Pembangunan dan pengembangan transportasi multimoda dan perkotaan.

No	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2019	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2015-2019)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2019		
							PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur perkeretaapian. 3. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.	infrastruktur perkeretaapian. 3. Dimulai pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.	dan Indonesia Barat. 2. Kelancaran mobilitas warga. 3. Penurunan biaya logistik Jakarta-Surabaya.		pembangunan dan peningkatan daya saing bangsa. SS4. Terwujudnya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim.	konektivitas dan kemaritiman.		
5.	Pengendalian implementasi kebijakan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Rencana Kegiatan di tahun 2019 terkait implementasi kebijakan tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) akan fokus pada koordinasi dan pengendalian terhadap industri dalam negeri.	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN.	Terciptanya pasar dalam negeri untuk industri dalam negeri.	Industri dalam negeri mendapatkan pasar dari dalam negeri sendiri.	SS4. Terwujudnya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim.	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.	Peningkatan nilai tambah pariwisata dan jasa produktif lainnya.	Peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri.
6.	Implementasi muatan kemaritiman kedalam	Rencana kegiatan di tahun 2019 1. Monitoring kurikulum	Implementasi kurikulum bidang kemaritiman di 21 Provinsi pada 84	Terlaksananya monitoring kurikulum bidang kemaritiman di 13	PAUD,SD,SMP /SMA/SMK	Menguatnya jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari yang	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, serta	Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja.	Penguatan penyelenggaraan pendidikan dan

No	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2019	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2015-2019)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2019		
							PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kurikulum pendidikan	kemaritiman melalui: a. Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum di 13 provinsi yang telah diterapkan tahun 2018. b. Perluasan implementasi kurikulum kemaritiman di 21 provinsi pada 84 sekolah Percontohan (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK). c. koordinasi penguatan guru dan penyiapan modul/bahan ajar. 2. Pengembangan pendidikan vokasi maritim. Koordinasi	sekolah percontohan (PAUD, SD, SMP/SMA/SMK).	provinsi dan terimplementasinya kurikulum kemaritiman di 21 provinsi.		inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara.	pariwisata dan jasa produktif lainnya.		pelatihan vokasi.

No	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2019	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2015-2019)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2019		
							PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		percepatan infrastruktur simulator untuk SMK (Nasional) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.							
7.	Pengendalian Rencana Aksi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum	1. Koordinasi pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang rencana aksi percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum 2018-2025.	1. 1 (satu) Peraturan Gubernur 2. Laporan kajian. 3. Pengadaan bibit 125 juta.	1. Perbaikan kualitas air baku. 2. Perbaikan kualitas lingkungan.	1. Masyarakat sekitar DAS Citarum. 2. Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/ kota sekitar DAS Citarum).	1. Meningkatnya nilai tambah sumberdaya alam dan jasa maritim secara berkelanjutan. 2. Menguatnya jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari yang	Pemantapan ketahanan, energi dan sumberdaya air.	Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan.	1. Pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. 2. Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan

No	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2019	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2015-2019)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2019		
							PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Koordinasi riset terkait kendala pelaku industri dalam pengelolaan Instansi Pengolaan Air Limbah (IPAL). 3. Koordinasi pengadaan pembibitan sebanyak 123 juta pohon dari 125 juta yang dibutuhkan.			3. Petani, Nelayan dan Pembudi-daya. 4. Masyarakat DKI Jakarta. 5. Instansi terkait.	inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara.			lingkungan hidup.
8.	Implementasi penanganan sampah laut (<i>marine debris</i>)	1. Pembentukan tim pelaksana penanganan sampah laut. 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN penanganan sampah laut. 3. Menyusun model pengelolaan	1. Terbitnya keputusan menteri koordinator tentang tim pelaksana. 2. Laporan monitoring dan evaluasi. 3. Strategi pengelolaan sampah laut (Danau Toba dan Labuan Bajo).	1. Meningkatkan kualitas kesehatan. 2. Meningkatkan daya tarik pariwisata. 3. Menjaga ekosistem laut.	1. Masyarakat tepi pantai khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. 2. Nelayan, pembudi-daya, dan sektor pariwisata.	Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan jasa maritim secara berkelanjutan.	Pemantapan ketahanan, energi, dan sumber daya air.	1. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas sumberdaya air. 2. Peningkatan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan.	1. Perlindungan sumber air dan ekosistemnya. 2. Pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. 3. Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan

No	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2019	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (Dalam Renstra 2015-2019)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2019		
							PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sampah laut pada lokasi tertentu. 4. Inisiasi kerjasama pengelolaan sampah laut dengan berbagai pihak (<i>Multi Donor Trust Fund</i> , Korea Selatan, <i>Private Sector</i>).	4. Komitmen kerjasama dengan berbagai pihak.						lingkungan hidup.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PRIORITAS DAN *QUICK WINS*
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN TAHUN 2019

QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2019

NO	PROGRAM PRIORITAS	USULAN <i>QUICK WINS</i>	<i>OUTPUT</i>	WAKTU PENCAPAIAN <i>OUTPUT</i>
1	Delimitasi Zona Maritim Indonesia	1. Submisi verifikasi dan pembakuan 16671 Pulau ke <i>United Nations Group of Experts on Geographical Names</i> (UNGEGN).	Dokumen Submisi Ke Perserikatan Bangsa-Bangsa	9 bulan
		2. Submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen utara papua seluas 196.568,9 km ² kepada <i>United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf</i> (UNCLCS).		6 bulan

2	Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata	Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Wakatobi dan Bromo Tengger Semeru (BOP-BTS)	Peraturan Presiden tentang BOP Wakatobi - BTS	9 bulan
3	Implementasi Muatan Kemaritiman ke dalam Kurikulum Pendidikan	Implementasi Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan	Terimplementasinya kurikulum muatan kemaritiman di sekolah percontohan di 21 Provinsi	12 bulan

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002